

Analisis Dampak Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat



Mely Angraeni ^{1,*}, Uswatun ², Muhammad Saiful ³

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

³ Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Islam Al Azhar, Mataram, Indonesia

* Corresponding author email: melyangraeni@gmail.com

ABSTRACT

Inflasi yang terjadi di Indonesia selama tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan akibat berbagai faktor global dan domestik, termasuk kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok, dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak langsung inflasi terhadap daya beli Masyarakat pada tahun 2025, terutama kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui analisis data dari BPS, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menemukan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan signifikan akibat kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Hasil analisis menekankan pentingnya kebijakan stabilisasi harga dan perlindungan sosial yang adaptif dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



Article History

Received 2025-07-20

Revised 2025-08-20

Accepted 2025-08-23

Keywords

Inflasi,

Daya Beli Masyarakat

PENDAHULUAN

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode. Inflasi tidak hanya berdampak pada kestabilan makroekonomi, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, terutama dalam aspek konsumsi dan kesejahteraan. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, inflasi menjadi isu penting karena dapat menggerus daya beli masyarakat jika tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan yang sepadan (Sukirno, 2016). Pada tahun 2025, Indonesia menghadapi tekanan inflasi yang cukup signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (2025) menunjukkan bahwa inflasi tahunan mencapai 4,7%, lebih tinggi dibandingkan target inflasi Bank Indonesia sebesar $3 \pm 1\%$. Kenaikan harga paling besar terjadi pada kelompok bahan makanan, transportasi, dan energi rumah tangga. Fenomena ini terjadi akibat kombinasi dari kenaikan harga energi global, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta gangguan distribusi logistik di dalam negeri.

Dampak langsung dari inflasi yang tinggi adalah turunnya daya beli masyarakat. Hal ini sangat terasa pada masyarakat berpenghasilan tetap dan kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. Ketika harga kebutuhan pokok naik secara konsisten sementara pendapatan tetap atau naik secara perlahan, maka konsumsi rumah tangga menurun, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Akibatnya, masyarakat akan cenderung mengurangi konsumsi barang-barang non-pokok, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Penurunan daya beli juga memiliki konsekuensi makroekonomi. Konsumsi rumah tangga yang selama ini menyumbang lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami pelemahan. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi domestik menjadi tidak optimal, terutama pada kuartal pertama dan kedua tahun 2025. Menurut laporan Bank Indonesia (2025), sektor ritel dan makanan minuman mencatatkan penurunan volume transaksi hingga 8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam konteks sosial, tekanan inflasi juga dapat memperlebar kesenjangan ekonomi. Kelompok masyarakat dengan aset dan akses ekonomi yang lebih baik masih mampu mempertahankan konsumsi mereka, sedangkan kelompok rentan semakin terdorong ke bawah garis kemiskinan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan adanya peningkatan

persentase rumah tangga yang mengalami penurunan konsumsi pangan bergizi pada triwulan pertama 2025 (BPS, 2025). Ini menjadi indikator bahwa inflasi telah mengancam kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menanggulangi dampak inflasi, seperti perluasan bantuan sosial, subsidi energi, serta operasi pasar untuk menekan harga bahan pokok. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat dan keterlambatan dalam pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola inflasi daerah juga menjadi persoalan tersendiri (Kemenkeu, 2025).

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah melakukan penyesuaian suku bunga acuan untuk menjaga ekspektasi inflasi agar tetap terkendali. Namun, langkah ini juga harus diimbangi dengan kebijakan yang memperkuat sisi penawaran (supply side) melalui peningkatan produktivitas sektor pangan dan energi. Tanpa dukungan kebijakan yang bersifat struktural, inflasi akan terus menjadi ancaman berulang yang melemahkan daya beli masyarakat secara sistematis (Mankiw, 2018). Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan kajian akademik yang lebih mendalam mengenai dampak inflasi tahun 2025 terhadap daya beli masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berbasis data, dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan. Penelitian ini juga menjadi refleksi penting terhadap kesiapan Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi makro ke depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang umum terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu yang menyebabkan penurunan nilai uang (Sukirno, 2016). Kenaikan harga ini tidak hanya berdampak pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang memiliki pendapatan tetap. Dalam jangka panjang, inflasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan ketidakpastian dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Mankiw (2018), inflasi yang tinggi dan tidak terkendali mengurangi nilai riil uang, sehingga masyarakat membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli, terutama bagi masyarakat yang penghasilannya tidak naik seiring laju inflasi. Dalam kondisi tersebut, konsumsi rumah tangga menjadi terganggu dan kualitas hidup masyarakat dapat menurun. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menjaga inflasi tetap dalam kisaran yang moderat dan stabil.

Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya, sedangkan tingkat inflasi adalah kenaikan harga-harga pada suatu tertentu berbanding dengan sebelumnya (Sukirno, 2015). Menurut Samuelson dan Nordhaus (2005) inflasi adalah peningkatan persentase harga secara umum yang terjadi pada suatu periode tertentu. Inflasi sebagai suatu keadaan yang mengindikasikan semakin melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil mata uang suatu negara (Khalwaty, 2001).

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa inflasi adalah proses kenaikan harga barang atau jasa dalam suatu perekonomian yang terjadi pada periode tertentu, jika inflasi terjadi secara terus menerus dengan tingkatan yang ekstrim maka akan melemahkan daya beli dan merosotnya nilai riil suatu negara. Pengukuran inflasi yang digunakan pada penelitian ini adalah inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia.

Inflasi di negara berkembang seperti Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kebijakan fiskal dan moneter, struktur pasar domestik, serta tingkat produksi barang kebutuhan pokok. Sementara itu, faktor eksternal mencakup harga komoditas global seperti minyak mentah dan pangan dunia, serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat. Ketergantungan Indonesia

terhadap impor bahan baku dan energi memperbesar dampak inflasi impor terhadap perekonomian domestik (Bank Indonesia, 2025).

Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Dari definisi tersebut ada tiga kriteria yang perlu diamati, untuk melihat telah terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga, bersifat umum, dan terjadi terus menerus dalam rentang waktu tertentu. Apabila terjadi kenaikan harga satu barang, yang tidak mempengaruhi harga barang lain, sehingga tidak naik secara umum, kejadian seperti itu bukanlah inflasi. Kecuali bila yang naik itu seperti harga BBM, ini berpengaruh terhadap harga-harga lain sehingga secara umum semua produk hampir mengalami kenaikan harga. Bila kenaikan harga itu terjadinya sesaat kemudian turun lagi, itu pun belum bisa dikatakan inflasi, karena kenaikan harga yang diperhitungkan dalam konteks inflasi mempunyai rentang waktu minimal sebulan (Murni, 2006).

Daya Beli Masyarakat

Daya beli sebagai kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa pada suatu pasar, pada tingkat pendapatan dan harga dalam suatu periode (Putong, 2013). Daya beli berhubungan dengan tingkat pendapatan dan harga yang tercermin sebagai tingkat konsumsi masyarakat. Semakin kecil pendapatan maka semakin rendah daya beli masyarakat karena tingkat konsumsi relatif lebih sedikit. Pengeluaran konsumsi rumah tangga harus mendapat perhatian lebih dalam kajian ekonomi makro karena sebagian besar pendapatan nasional disumbangkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Terjadinya inflasi akan menaikkan harga secara umum sehingga menyebabkan penurunan pada konsumsi yang akan terjadi penurunan konsumsi menyebabkan daya beli riil masyarakat menjadi turun (Nur, 2012). Daya beli masyarakat didefinisikan sebagai kemampuan individu atau rumah tangga dalam memperoleh barang dan jasa dengan pendapatan yang dimiliki. Ketika harga barang naik dan pendapatan tetap, maka jumlah barang dan jasa yang bisa dibeli dengan pendapatan tersebut menurun (Todaro & Smith, 2020). Dengan kata lain, inflasi secara langsung menurunkan daya beli riil. Daya beli bukan hanya ukuran ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan tingkat kesejahteraan dan standar hidup masyarakat.

Penurunan daya beli akibat inflasi memiliki dampak yang lebih besar terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka cenderung mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi kebutuhan dasar seperti pangan, energi, dan transportasi. Ketika harga barang-barang ini naik, mereka memiliki sedikit fleksibilitas untuk menyesuaikan pengeluaran, berbeda dengan kelompok berpenghasilan tinggi yang memiliki cadangan konsumsi atau tabungan. Hal ini membuat inflasi bersifat regresif, karena lebih membebani kelompok miskin daripada kelompok kaya (Ranis & Stewart, 2020).

Beberapa studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara inflasi dan daya beli, khususnya dalam jangka pendek. Misalnya, penelitian oleh Wahyuni (2022) menunjukkan bahwa kenaikan inflasi sebesar 1% berpotensi menurunkan konsumsi rumah tangga sebesar 0,6% pada kuintil terbawah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan daya tahan ekonomi kelompok miskin terhadap guncangan harga. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi penting tidak hanya dari sisi stabilitas ekonomi makro, tetapi juga dari sisi keadilan sosial.

Dalam upaya mengendalikan inflasi, peran pemerintah dan bank sentral sangat krusial. Pemerintah dapat menggunakan instrumen fiskal seperti subsidi dan bantuan sosial, sementara bank sentral mengandalkan instrumen moneter seperti suku bunga dan pengendalian jumlah uang beredar. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kecepatan respons, koordinasi antar lembaga, dan kualitas data sasaran. Kebijakan yang tepat dapat meredam inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sedangkan kebijakan yang terlambat atau tidak tepat sasaran dapat memperparah tekanan inflasi.

Penelitian Mengenai Efek Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat

Penelitian mengenai efek inflasi terhadap daya beli masyarakat memiliki signifikansi yang luar biasa dalam kerangka pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pertama-tama, pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara inflasi dan daya beli masyarakat memberikan landasan bagi perumusan kebijakan ekonomi yang lebih cerdas dan

berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan memahami perubahan tingkat inflasi dapat merusak atau meningkatkan daya beli, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah preventif atau stimulus yang sesuai untuk mengendalikan dampak negatif atau mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini memegang peran kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan mengeksplorasi bagaimana inflasi mempengaruhi keputusan konsumen, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi masyarakat untuk mengelola keuangan dengan lebih bijak. Kesadaran terhadap hubungan antara inflasi dan daya beli dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang cara menghadapi tantangan ekonomi, merencanakan anggaran, dan mengoptimalkan pengeluaran.

Pentingnya penelitian ini juga dapat dilihat dalam konteks globalisasi dan ketidakpastian ekonomi saat ini. Dalam menghadapi perubahan cepat dalam skenario ekonomi global, pemahaman yang lebih baik tentang efek inflasi terhadap daya beli dapat membantu negara untuk merancang kebijakan yang responsif dan adaptif. Penelitian ini dapat memberikan panduan berharga bagi negaranegara untuk mengelola inflasi dengan lebih efektif, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi kesejahteraan rakyat di tengah dinamika ekonomi global yang fluktuatif (Rahmawati & Setyobudi, 2023, hlm. 2015–2019).

Di samping itu, kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan teori ekonomi makro menjadi penting untuk memperkaya basis pengetahuan dalam disiplin ilmu ini. Temuan penelitian dapat menjadi sumbangan berharga bagi perkembangan teori dan dapat membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut dalam memahami intricacies hubungan antara inflasi dan daya beli masyarakat. Sebagai bagian dari upaya membangun pengetahuan ekonomi yang lebih kokoh, penelitian ini dapat membuka pintu untuk penyelidikan lebih lanjut dan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku ekonomi masyarakat dalam menghadapi tantangan inflasi (Harida & Sulisnaningrum, 2021).

Perubahan tingkat inflasi di Indonesia menjadisebuah realitas yang tidak terhindarkan dan memiliki dampak yang cukup nyata terhadap daya beli masyarakat. Inflasi, sebagai fenomena ekonomi, telah menjadi bagian integral dalam dinamika perkembangan ekonomi negara ini. Saat inflasi meningkat, berbagai lapisan masyarakat dapat merasakan fluktuasi dalam kemampuan untuk membeli barang dan jasa. Adanya kenaikan harga barang dan jasa merupakan salah satu dampak langsung dari perubahan tingkat inflasi. Hal ini dapat menimbulkan tekanan pada daya beli masyarakat, terutama jika peningkatan harga tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan yang proporsional. Peningkatan harga kebutuhan pokok, seperti makanan dan energi, seringkali menjadi beban tambahan bagi konsumen, terutama bagi yang berpenghasilan rendah.

Dalam dinamika ini, terdapat pola atau tren khusus yang dapat diidentifikasi. Selama periode inflasi tinggi, terkadang terjadi penurunan tajam dalam daya beli masyarakat, mengakibatkan pergeseran preferensi konsumen ke arah produk atau layanan yang lebih terjangkau. Namun, dalam situasi inflasi yang lebih terkendali, dampaknya mungkin lebih terbatas, dan pola konsumsi masyarakat dapat tetap relatif stabil (Marpaung, 2022). Respon konsumen terhadap perubahan tingkat inflasi memainkan peran penting dalam membentuk dinamika ekonomi. Konsumen cenderung menyesuaikan pola belanja, lebih berhati-hati dalam pengeluaran, dan mencari cara untuk memaksimalkan nilai uang. Keterlibatan konsumen ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi sejauh mana masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan fluktuasi ekonomi.

Variabel-variabel ekonomi makro turut memainkan peran sentral dalam membentuk dinamika antara inflasi dan daya beli. Suku bunga yang ditetapkan oleh otoritas moneter dapat mempengaruhi biaya pinjaman, yang pada gilirannya memengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat pengangguran yang rendah dapat memberikan dukungan positif terhadap daya beli masyarakat, sementara ketidakstabilan dalam variabel-variabel ini dapat memperumit situasi.

Secara keseluruhan, pemahaman mendalam tentang hubungan kompleks antara inflasi, daya beli masyarakat, dan variabel-variabel ekonomi makro sangat penting dalam merancang kebijakan yang responsif. Melalui analisis yang holistik ini, diharapkan kebijakan ekonomi

dapat lebih efektif dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Fairuzie dkk., 2022).

Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisis secara mendalam dampak perubahan tingkat inflasi terhadap daya beli masyarakat di Indonesia. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi makro yang berperan dalam membentuk hubungan antara inflasi dan daya beli. Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi pola atau tren yang mungkin ada dalam dinamika ini, dengan harapan dapat memberikan pandangan yang lebih holistik dan kontekstual tentang dampak inflasi pada tingkat daya beli. Dengan demikian, tujuan akhir penelitian ini adalah memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Secara teoritis dan empiris, hubungan antara inflasi dan daya beli masyarakat telah terbukti signifikan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam dampak perubahan tingkat inflasi terhadap daya beli masyarakat di Indonesia. Pemahaman terhadap teori-teori ekonomi makro mengenai inflasi, daya beli, dan keseimbangan pasar sangat penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Kajian ini mencoba mengkaji lebih jauh dinamika hubungan antara inflasi dan daya beli masyarakat di Indonesia tahun 2025, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat di Indonesia selama tahun 2025. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran sistematis mengenai hubungan antara variabel inflasi dan variabel konsumsi rumah tangga, khususnya dalam konteks penurunan daya beli.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai lembaga resmi, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Data yang dikumpulkan mencakup tingkat inflasi bulanan dan tahunan, indeks harga konsumen (IHK), nilai tukar rupiah, konsumsi rumah tangga per kapita, serta data program bantuan sosial (BLT dan subsidi) sepanjang tahun 2025. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan software pengolahan data statistik seperti Microsoft Excel dan SPSS untuk menyusun grafik tren, menghitung rasio perubahan daya beli, serta mengidentifikasi pola keterkaitan antara inflasi dan konsumsi. Interpretasi data dilakukan secara komparatif terhadap kondisi ekonomi tahun 2024 sebagai tahun pembandingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren Inflasi

Inflasi Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama pada kuartal pertama. Inflasi bulan-ke-bulan (month-to-month/mtm) mencapai 1,5% pada Januari 2025, yang merupakan lonjakan tertinggi dalam satu dekade terakhir. Penyebab utama dari kenaikan ini adalah peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dan lonjakan harga pangan impor akibat gangguan rantai pasok global dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (Bank Indonesia, 2025). Secara tahunan (year-on-year/yoy), tingkat inflasi per Mei 2025 tercatat sebesar 4,7%, melampaui batas atas target inflasi Bank Indonesia sebesar $3 \pm 1\%$. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, menandai tekanan harga yang cukup besar terhadap stabilitas ekonomi domestik. Ketidakpastian global yang disebabkan oleh konflik geopolitik dan ketatnya kebijakan moneter di negara-negara maju turut memperparah situasi (Kemenkeu, 2025).

Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi tertinggi, yakni sebesar 6,2% secara tahunan. Kenaikan harga bahan makanan seperti beras, cabai, dan daging menjadi pemicu utama. BPS (2025) melaporkan bahwa harga beras medium naik hingga 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dipicu oleh cuaca ekstrem yang mengganggu produksi domestik serta berkurangnya pasokan global.

Selain bahan makanan, inflasi tinggi juga terjadi pada kelompok transportasi, terutama akibat penyesuaian harga BBM non-subsidi yang diberlakukan pada awal tahun. Pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Turbo sebagai langkah penyesuaian terhadap harga minyak dunia yang meningkat. Hal ini berdampak ganda: tidak hanya meningkatkan pengeluaran transportasi masyarakat, tetapi juga mendorong kenaikan biaya logistik yang pada akhirnya menekan harga barang konsumsi lainnya (BPS, 2025). Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut memperburuk tekanan inflasi, terutama terhadap barang-barang impor. Sejak awal tahun, rupiah telah melemah sebesar 4,2% terhadap dolar, yang secara langsung menaikkan biaya impor bahan pangan dan barang modal. Kondisi ini membuat tekanan inflasi dari sisi penawaran (cost-push inflation) semakin dominan, di luar faktor-faktor permintaan (demand-pull inflation) (Bank Indonesia, 2025).

Dari sisi spasial, inflasi tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi-provinsi di luar Jawa, terutama di wilayah timur seperti Papua dan Maluku, mengalami inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah barat. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya distribusi, keterbatasan stok barang, serta rendahnya kapasitas produksi lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia juga memiliki dimensi geografis yang perlu ditangani secara spesifik oleh pemerintah daerah dan pusat.

Melihat tren sepanjang semester pertama tahun 2025, inflasi diperkirakan tetap berada pada level tinggi hingga pertengahan tahun, sebelum menurun secara perlahan apabila respons kebijakan berjalan efektif. Pemerintah dan Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah pengendalian seperti operasi pasar, peningkatan cadangan pangan nasional, dan penyesuaian suku bunga acuan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih bergantung pada faktor eksternal dan stabilitas fiskal di dalam negeri. Oleh karena itu, penting untuk menjaga koordinasi kebijakan secara berkelanjutan guna mencegah inflasi yang lebih luas dan berkepanjangan.

Dampak Terhadap Daya Beli Masyarakat

Inflasi yang meningkat tajam pada tahun 2025 memberikan dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan tetap. Kelompok ini, yang terdiri dari buruh, pekerja informal, dan pegawai dengan penghasilan tetap, tidak memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan pendapatan mereka dengan kenaikan harga. Akibatnya, konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen utama dalam struktur pengeluaran nasional mengalami tekanan yang cukup berat.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2025) mencatat adanya penurunan konsumsi pangan per kapita sebesar 8% dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini menjadi indikator jelas bahwa masyarakat tidak hanya mengurangi volume konsumsi, tetapi juga kualitas asupan makanan mereka. Konsumsi protein hewani seperti daging dan ikan mengalami penurunan tajam, terutama di kalangan rumah tangga miskin, yang cenderung menggantinya dengan bahan pangan yang lebih murah dan kurang bergizi.

Dampak inflasi terhadap daya beli juga terasa dalam perubahan pola konsumsi. Banyak rumah tangga mengurangi pembelian barang-barang non-esensial seperti pakaian, rekreasi, dan peralatan rumah tangga, dan lebih memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Hal ini menyebabkan perlambatan pada sektor perdagangan ritel dan jasa yang sebelumnya menjadi motor pertumbuhan konsumsi domestik. Laporan Bank Indonesia (2025) menunjukkan bahwa indeks penjualan riil turun sebesar 4,3% pada kuartal pertama tahun 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah mengalami dampak yang paling berat karena sebagian besar pendapatan mereka dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Ketika harga-harga kebutuhan dasar meningkat, ruang fiskal rumah tangga mereka menyempit, sehingga tidak ada cadangan untuk pengeluaran darurat atau tabungan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperbesar risiko kemiskinan struktural dan memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi antar kelompok masyarakat (Todaro & Smith, 2020).

Kondisi ini juga berdampak pada penurunan kesejahteraan psikologis masyarakat. Keterbatasan daya beli menyebabkan stres ekonomi, yang dapat mengganggu produktivitas kerja dan meningkatkan ketidakstabilan sosial. Beberapa daerah bahkan mencatatkan peningkatan kasus putus sekolah dan pekerja anak sebagai akibat dari tekanan ekonomi

rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa inflasi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup dan masa depan generasi muda.

Dalam jangka pendek, strategi penyesuaian konsumsi rumah tangga menjadi respons utama masyarakat menghadapi inflasi. Namun, jika inflasi berlangsung dalam waktu yang lama tanpa diimbangi oleh peningkatan pendapatan riil, maka daya beli akan terus melemah. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan sosial dan memastikan keberlanjutan program bantuan tunai dan subsidi yang tepat sasaran. Selain itu, upaya peningkatan produktivitas dan pengendalian harga komoditas pangan domestik menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat.

Respons Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia merespons lonjakan inflasi tahun 2025 melalui berbagai kebijakan fiskal dan sosial, terutama dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk subsidi energi dan program bantuan sosial. Salah satu langkah utama adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada lebih dari 25 juta rumah tangga miskin dan rentan yang terdampak langsung oleh kenaikan harga barang pokok. BLT ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah lonjakan angka kemiskinan akibat inflasi yang tidak terkendali (Kementerian Keuangan, 2025).

Namun, pelaksanaan program bantuan tersebut tidak berjalan tanpa kendala. Laporan dari Kementerian Sosial dan Kemenkeu menunjukkan bahwa distribusi bantuan di beberapa daerah mengalami keterlambatan hingga dua bulan. Selain itu, persoalan klasik seperti ketidaktepatan sasaran, duplikasi data penerima manfaat, dan lemahnya akurasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) masih menjadi hambatan dalam efektivitas program. Hal ini menyebabkan sebagian besar rumah tangga yang seharusnya menerima bantuan tidak mendapatkan perlindungan secara tepat waktu (BPS, 2025). Untuk menekan tekanan inflasi dari sisi moneter, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 basis poin pada bulan April 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk meredam ekspektasi inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah yang cenderung melemah akibat ketidakpastian global. Kebijakan suku bunga ini juga diharapkan dapat menahan permintaan agregat yang berlebihan, sehingga laju inflasi dapat ditekan melalui jalur pengendalian konsumsi (Bank Indonesia, 2025).

Di samping kebijakan suku bunga, Bank Indonesia juga melakukan intervensi pasar melalui operasi moneter seperti penjualan surat berharga negara (SBN) dan penguatan cadangan devisa guna menstabilkan pasar valas. Namun, efektivitas langkah-langkah ini masih terbatas mengingat penyebab utama inflasi bersifat struktural dan berasal dari sisi pasokan, seperti gangguan produksi pangan dan distribusi barang. Oleh karena itu, pengendalian inflasi tidak dapat sepenuhnya diselesaikan dengan pendekatan moneter saja. Pemerintah juga mendorong operasi pasar dan stabilisasi harga melalui Perum Bulog, terutama untuk komoditas beras, gula, dan minyak goreng. Kebijakan ini membantu menekan harga di pasar tradisional, meskipun efeknya seringkali bersifat jangka pendek dan terbatas secara geografis. Di beberapa wilayah timur Indonesia, keterbatasan logistik dan transportasi membuat harga tetap tinggi meskipun operasi pasar telah digelar. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi rantai pasok pangan menjadi kebutuhan mendesak (Kemenko Perekonomian, 2025).

Kedepan, respons kebijakan terhadap inflasi memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Selain bantuan sosial dan intervensi harga, pemerintah perlu memperkuat ketahanan pangan nasional melalui investasi di sektor pertanian, infrastruktur distribusi, serta digitalisasi sistem perlindungan sosial. Tanpa reformasi struktural, kebijakan jangka pendek hanya akan menjadi penanganan sementara yang tidak menyentuh akar persoalan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat.

KESIMPULAN

Tahun 2025 menunjukkan bahwa inflasi memiliki dampak nyata terhadap penurunan daya beli masyarakat Indonesia, khususnya di sektor rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah. Inflasi menyebabkan peningkatan harga kebutuhan pokok, yang tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan yang memadai. Saran kebijakan: 1.) Peningkatan efektivitas subsidi dan bantuan sosial dengan sistem digitalisasi berbasis data terpadu. 2.) Diversifikasi

sumber pangan dan energi untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Dan 3.) Penyesuaian Upah Minimum Regional (UMR) secara berkala berdasarkan tingkat inflasi aktual dan proyeksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, H. (2017). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 5(3).
- Artati, L., Syuhada, N., & Avika, N. (2025). Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2(1), 306-315.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Laporan Perkembangan Inflasi Nasional Mei 2025*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenar) Triwulan I Tahun 2025*. Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia. (2025). *Laporan Perekonomian Indonesia Semester I 2025*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Eduar, R. (2024). Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lahat. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(1), 72-80.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Outlook Ekonomi dan Fiskal Indonesia Semester I 2025*. Jakarta: Kemenkeu.
- Khalwaty, T. 2001. *Inflasi dan Solusinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of Economics (8th ed.)*. Boston: Cengage Learning.
- Murni, Asfia. (2006). *Ekonomika Makro*. Bandung: PTRefika Aditama.
- Nasir, N. (2025). ANALISIS DAMPAK INFLASI TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT BERPENGHASILAN MENENGAH KE BAWAH DI MAKASSAR. *Journal Of Economic Research*, 1(1), 1-8.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nur, Ermon Muh. 2012. Konsumsi dan Inflasi Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1): 55-72.
- Nurkhanifah, E., & Arifin, S. (2023). Analisis Dampak Menurunnya Daya Beli Di Lingkungan Masyarakat Indonesia Akibat Inflasi. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 240-248.
- Putong, Iskandar. 2013. *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ranis, G., & Stewart, F. (2020). *The Dynamics of Poverty and Income Inequality*. Oxford: Oxford University Press.
- Rialita, A. J., & Syahputra, A. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Keterbelanjaan Masyarakat dari Perspektif Ekonomi Makro. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1(2), 28-52.
- Rizani, A., Norrahman, R. A., Harsono, I., Yahya, A. S., & Syifa, D. M. (2023). Efek Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat pada Tinjauan Ekonomi Makro. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 1(2).
- Rofiqoh, A., Wulandari, F., & Husnah, T. N. (2025). *Dampak Inflasi Terhadap Stabilitas Ekonomi Makro*. *Journal of Law, Education and Business*, 3(1), 759-770.
- Sadono Sukirno. (2016). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Samuelson & Nordhaus. 2005. *Economics 8th Edition*. New York: Mc Graw Hill-Irwin.
- Saragih, R. F., Nasution, J., & Daulay, A. N. (2023). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Penyaluran Dana Zakat terhadap Daya Beli Masyarakat di Sumatera Utara. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 12(2).
- Sari, S. P., & Nurjannah, S. (2023). Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar dan BI Rate Terhadap inflasi di Indonesia dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management*, 1(1), 21-29.
- Sholihah, H., Karomah, N., & Astuti, R. P. (2025). Dampak Inflasi Terhadap Daya Beli Dan Kesejahteraan Rumah Tangga Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 300-303.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

-
- Sukirno, Sadono. 2015. *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Cetakan ke-23*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- TARIGAN, J. S. (2025). Analisis Dampak Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat Perkotaan. *Circle Archive*, 1(7).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development (13th ed.)*. Harlow: Pearson Education.